

**PENGARUH VARIABEL PENDIDIKAN, PENGANGGURAN,
RASIO GINI, USIA, DAN JUMLAH POLISI PERKAPITA
TERHADAP ANGKA KEJAHATAN PROPERTI
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2012**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YUDHO DITO ARSONO
NIM. C2B008077

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yudho Dito Arsono

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008077

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH VARIABEL PENDIDIKAN,
PENGANGGURAN, RASIO GINI, USIA DAN
JUMLAH POLISI PERKAPITA TERHADAP
ANGKA KEJAHATAN PROPERTI DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-
2012**

Dosen Pembimbing : Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si

Semarang, Juni 2014

Dosen Pembimbing

(Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si)

NIP. 197508212002122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yudho Dito Arsono
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008077
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH VARIABEL PENDIDIKAN,
PENGANGGURAN, RASIO GINI, USIA DAN
JUMLAH POLISI PERKAPITA TERHADAP
ANGKA KEJAHATAN PROPERTI DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2010-2012**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 23 Juni 2014

Tim Penguji:

1. Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, S.E, M.Si (.....)
3. Fitrie Arianti, S.E, M.Si (.....)

Semarang, juli 2014

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yudho Dito Arsono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH VARIABEL PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, RASIO GINI, USIA, DAN JUMLAH POLISI PERKAPITA TERHADAP ANGKA KEJAHATAN PROPERTI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2012” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah - olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2014
Yang membuat pernyataan,

(Yudho Dito Arsono)
NIM. C2B 008 077

ABSTRACT

Property crime was the most dominant kinds of crime in central java than another. Property crime are defined as the kind of crime which aims to takes goods or the property of another (victims) such as: theft, robbery, mugging, burglary, and vehicle theft. In this research we try to analyzed the property crime with economic approach. The aims of this research is to analyzed the factors that influence againt property crime in the Province of Central Java. Such as education, unemployment, gini ratio, the proportion of men aged 25-34, and the number of police officers percapita. And we use a panel data from 35 Districts/Cities in Central Java during period of 2010-2012. Using the fixed effect method with LSDV approach, we find that variables has related to economic factor such as education, unemployment, and gini ratio significantly influence againt property crime in the Central Java. Then own result also proved that unemployment is related negatively againt property crime. This is different from most previous research which showed that unemployment is related positively againt property crimes.

Key word: *Property crime, Central Java Provinces, Fixed Effect Method, LSDV*

ABSTRAKSI

Kejahatan properti merupakan jenis kejahatan yang paling dominan di Jawa tengah dibanding jenis kejahatan yang lain. Kejahatan properti diartikan sebagai jenis kejahatan yang bertujuan untuk mengambil barang atau hak milik orang lain (korban) seperti: pencurian, perampokan, penjabretan, pembobolan rumah, dan pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini mencoba menganalisis kejahatan properti dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi kejahatan properti di Provinsi Jawa tengah. Seperti pendidikan, pengangguran, rasio gini, proporsi pria umur 25-34, dan jumlah polisi perkapita. Kami menggunakan data panel dari 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2010-2012. Menggunakan metode *fixed effect* dan pendekatan LSDV, kami menemukan bahwa variabel variabel yang terkait dengan ekonomi seperti variabel pendidikan, pengangguran, dan rasio gini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian hasil kami juga membuktikan bahwa pengangguran berhubungan negatif terhadap kejahatan properti. Hal ini berbeda dari kebanyakan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengangguran berhubungan positif terhadap kejahatan properti.

Kata Kunci : Kejahatan properti, Jawa Tengah, metode *fixed effect*, LSDV

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan Merubah nasib suatu kaum Sebelum mereka berusaha merubahnya Sendiri.

(Ar-raad : 79)

Belajarlal selagi yang lain sedang tidur, bekerjalal selagi yang lain bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap

(William Arthur Ward)

Jadilah yang pertama..jika tidak, jadilah yang terbaik..jika masih tidak juga, jadilah yang berbeda.

“Be the first..be the best..and be different”

(Bob Sadino, Entrepreneur)

“Skripsi ini kupersembahkan untuk;

kedua orang tuaku tercinta : Bapak Kiswarsono dan Ibu Sulastri,

Serta segenap keluarga besarku..”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur dan terima kasih selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penullis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, Dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Properti Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Sebelumnya, tidak lupa penulis menyampaikan ucapan maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kesalahan selama proses penelitian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Melalui tulisan yang sederhana ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Hadi Sasana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing serta memberi masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nenek Woyanti, S.E, M.Si, selaku dosen wali atas segala arahan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.
6. Bapak AKBP Mugita, selaku bagian Binops Reskrim Polda Jateng yang turut membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu dan Bapak tercinta (Ibu. Sulastri dan Bpk. Kiswarsono) dan Adik adikku tersayang Yogi R Arsono dan Ardhya R Pramesty yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa, bimbingan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Risna Tiara Azri, untuk semangat dan motivasi yang tak pernah henti hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
9. IESP 08 Adventure Team, Haryo, Tedy, Tresna, Cahyo, Azhar, Bayu Setyoko, Bayu Prasetyo, Anas, Fendi, Ardana, Riza, Galuh, Tian, Silvianingrum, dan Syamsudin. Kebersamaan kalian tiada duanya kawan.
10. Sahabat-sahabat IESP, Asep, Indra, Wahyu, Sholeh, Mahoca, Dicky, Rian, Dika, Nailul, Cahya, Anang, Egi, Tezar, Eko, Fanita, Arum, Diah, Nila, Dita, Yolanda, lintan, Lintantia, kety, Fitri, Marita, Ayola, Iin ,Niken, Velina serta seluruh teman – teman IESP 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya selama kuliah ini, kalian adalah para sahabat terhebat yang pernah penulis miliki.

11. Teman-teman IESP 07 dan IESP 09, Akrom, Abi, Hafid, Indra, Angga, wimbo aji, karisun, fajar, Novita Dinar, Nur Widi Astuti, Ainun Rachmawati, dan Erlinda Puspita Sari. Terimakasih atas bantuan dan motivasi yang kalian beri kepada penulis. Sukses untuk kalian semua.
12. Sahabat – sahabat penghuni kos dan kontrakan Tusam, Pradana, Iqbal, Ade, Imam, Bagus, Firman, Izul, Bagus Aji, Reza A, Pimo. Terimakasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan pada penulis.
13. Teman – teman kecilku, David, Elbaz, Bebend, Koliq, Edwin, Veroni, Bobby, ma'on, serta yang lain yang tidak bisa penulis sebut satu per satu. Terima kasih atas dorongan serta motivasi yang kalian berikan.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis berharap semoga kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik berikutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2014

Penulis

Yudho Dito Arsono

2.1.2.3.1.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kejahatan.....	35
2.1.2.4.	Distribusi Pendapatan.....	36
2.1.2.4.1	Pengaruh Kesenjangan Pendapatan Terhadap Tingkat kejahatan.....	38
2.1.2.5.	Konsep Kependudukan.....	39
2.1.2.5.1	Pengaruh Usia Terhadap Tingkat Kejahatan	40
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	41
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	48
2.4.	Hipotesis.....	50
BAB III	METODE PENELITIAN.....	51
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	51
3.1.1.	Variabel Penelitian.....	51
3.1.2.	Definisi Operasional.....	51
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	54
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	54
3.4.	Metode Analisis.....	54
3.4.1	Analisis Deskriptif.....	55
3.4.2.	Analisis Kuantitatif.....	53
3.5.	Pendeteksian Asumsi Klasik.....	60
3.5.1.	Deteksi Multikolinearitas.....	60
3.5.2.	Deteksi Autokorelasi.....	61
3.5.3.	Deteksi Heterokedastisitas.....	63
3.5.4.	Deteksi Normalitas.....	63
3.6.	Pengujian Hipotesis.....	64
3.6.1.	Uji Goodnes Of Fit (Koefisien Determinasi/ R^2).....	64
3.6.2.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	65
3.6.3.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	67

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	69
4.1.1.	Kondisi Geografis.....	69
4.2.	Perkembangan Kejaharan di Kota Semarang.....	70
4.2.1.	Angka Kejahatan.....	70
4.2.2.	Tingkat Kejahatan.....	74
4.2.3.	Karakteristik Pelaku Kejahatan.....	76
4.2.4.	Kejahatan, Penduduk, dan Ekonomi.....	77
4.2.5.	Anggaran Pemerintah dan Jumlah Personil Kepolisian.....	82
4.3.	Analisis Data.....	85
4.3.1.	Hasil Regresi Utama.....	85
4.4.	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	86
4.4.1	Deteksi Multikolinearitas.....	86
4.4.2.	Deteksi Autokorelasi.....	86
4.4.3.	Deteksi Heterokedastisitas.....	87
4.4.4.	Deteksi Normalitas.....	87
4.5.	Pengujian Statistik Analisis Regresi.....	88
4.5.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	88
4.5.2.	Uji Signifikansi Individual (Uji t).....	89
4.5.3.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	91
4.6.	Interpretasi Individual Effect Pada Model FEM.....	92
4.7.	Interpretasi Hasil Regresi Utama.....	107
4.7.1.	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Rasio Gini, Proporsi usia dan, Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah 2010-2012.....	107
4.7.1.1.	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah.....	108

4.7.1.2.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah.....	109
4.7.1.3.	Pengaruh Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah	110
BAB V	PENUTUP	111
5.1.	Simpulan.....	112
5.2.	Keterbatasan.....	112
5.3.	Saran.....	113
	DAFTAR PUSTAKA	115
	LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Lima Kepolisian Daerah yang Memiliki Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Tertinggi (dalam satuan persen) Tahun 2010-2012.....	3
Tabel 1.2.	Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota Dengan Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	6
Tabel 1.3.	Penduduk Jawa Tengah berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut kabupaten/Kota Dan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2010-2012.....	7
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.....	10
Tabel 1.5.	Jumlah Tindak Pidana Menonjol Di Jawa tengah Tahun 2010-2012	12
Tabel 1.6.	Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk Per Polisi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	13
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1.	Uji Durbin-Watson.....	63
Tabel 4.1.	Jumlah Tindak Pidana Menonjol Di Jawa tengah Tahun 2010-2012	73
Tabel 4.2.	Anatomi Pelaku Kejahatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012.....	77
Tabel 4.3.	Penduduk Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Umur.....	79
Tabel 4.4.	Penduduk Jawa Tengah berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut kabupaten/Kota Dan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2010-2012.....	81
Tabel 4.5.	Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Kebutuhan Hidup Layak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2012 (Rupiah).....	82
Tabel 4.6.	Rasio Penduduk Per Polisi Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	85
Tabel 4.7	Tabel Residual Correlation Matrix.....	87
Tabel 4.8	Nilai Intersep Setiap Individu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) dan Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan di Indonesia (<i>Crime Cleared</i>) Tahun 2010 – 2012.....	2
Gambar 1.2.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.....	3
Gambar 1.3.	Pemerataan Pendapatan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.....	9
Gambar 2.1.	Permintaan dan Penawaran Kejahatan.....	26
Gambar 2.2.	Kurva Lorenz.....	38
Gambar 2.3.	Kerangka Pemikiran.....	50
Gambar 4.1.	Angka Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	71
Gambar 4.2.	Pertumbuhan Kejahatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2012.....	72
Gambar 4.3.	Jumlah Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	74
Gambar 4.4.	Pertumbuhan Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	75
Gambar 4.5.	Tingkat kejahatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012...	76
Gambar 4.6.	Tingkat Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	76
Gambar 4.7.	Jumlah Penduduk Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kab/Kota	78
Gambar 4.8.	Jumlah Siswa yang Mampu Menamatkan Pendidikan Jenjang SMA Sederajat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.....	80
Gambar 4.9.	Rincian Anggaran Belanja Negara Menurut Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010 – 2012.....	84
Gambar 4.10.	Hasil Uji Jarque-Bera.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Hasil Regresi Utama.....	119
Lampiran B	Asumsi Klasik.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

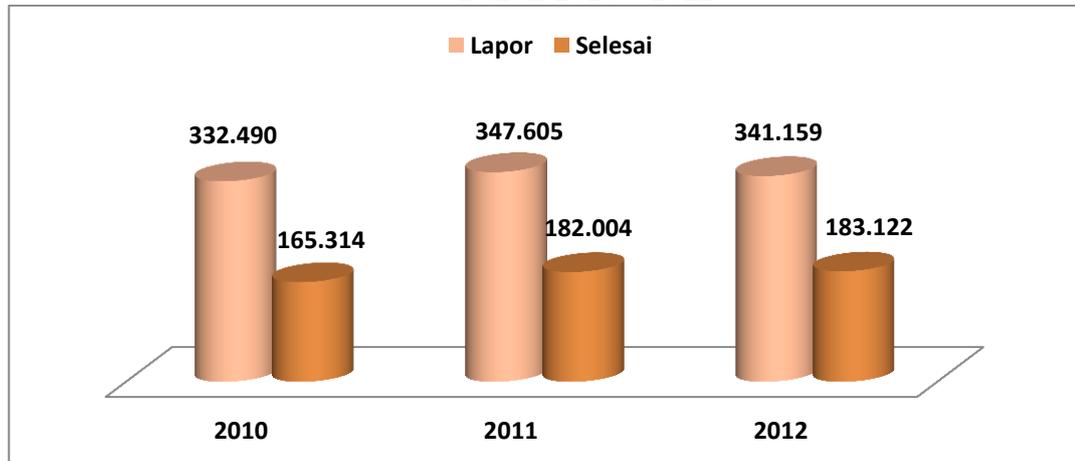
1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang disertai dinamika pertumbuhan budaya dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan persaingan dalam berbagai hal, baik itu dalam bidang ideologi, ekonomi, maupun kemasyarakatan. Pokok persoalan yang sangat mendasar adalah terletak pada invasi kebudayaan, setidaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti, materialisme, hedonisme dan lain sebagainya, yang sedikit banyak mempengaruhi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku itu akan mengakibatkan perilaku manusia berubah dan perubahan yang berdampak negatif terlihat dari munculnya perilaku yang menyebabkan keresahan dalam masyarakat, misalnya dambaan pemenuhan kebutuhan material yang melimpah tanpa diimbangi kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, sehingga manusia menempuh segala cara untuk mewujudkan dambaan tersebut seperti melalui tindak kejahatan (Kartono 1992) dalam Juwarti (2004).

Ada dua faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor ekstern (Abdulsyani, 1987) dalam Astuti (2014). Sifat khusus dalam diri individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi, sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Faktor ekstern

dapat mencakup faktor-faktor ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urabanisasi), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film.

Gambar 1.1
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan di Indonesia (*Crime Cleared*) Tahun 2010 – 2012



Sumber: BPS, 2012

Perkembangan kejahatan di Indonesia selama tahun 2010-2012 mengalami peningkatan di tahun 2011 dari 332.490 kasus menjadi 347.605 kasus. Namun, kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 341.159 kasus kejahatan. Dan jumlah dari kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian menunjukkan tren yang meningkat yaitu sebesar 165.314 kasus di tahun 2010 menjadi 182.004 kasus. kemudian meningkat lagi sebesar 183.122 kasus di tahun 2012

Jumlah dari kasus kejahatan yang diselesaikan adalah mencerminkan dari keefektifan kinerja aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Tabel 1.1 menunjukkan lima provinsi dengan *clearance rate* atau persentase penyelesaian kejahatan tertinggi selama tahun 2010 hingga 2012. Provinsi Jawa Tengah selama dua periode (2010-2011) menempati urutan pertama dengan tingkat penyelesaian kejahatan 90,24 persen hingga 109,41 persen. Tahun

2012, provinsi ini sempat turun pada urutan ke-4 dengan tingkat penyelesaian kejahatan sebesar 82,42 persen.

Tabel 1.1
Lima Kepolisian Daerah yang Memiliki Persentase Penyelesaian Kejahatan
(Clearance Rate) Tertinggi (dalam satuan persen)
 Tahun 2010-2012

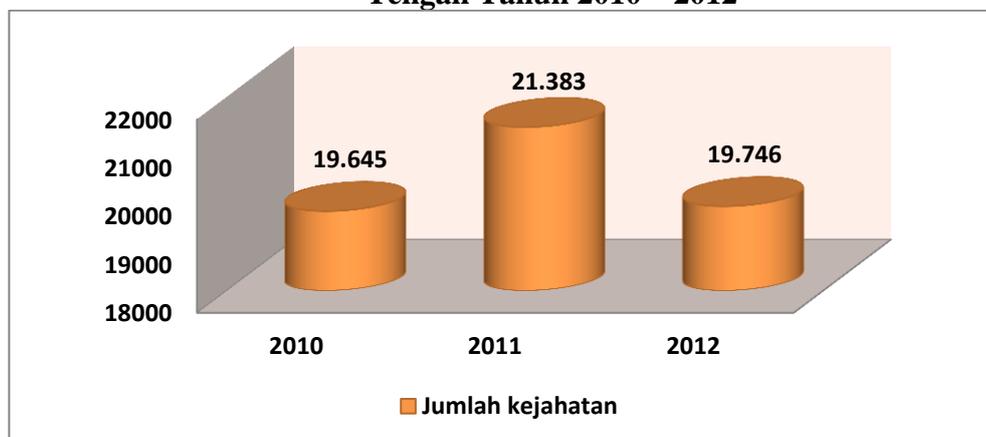
URUTAN	TAHUN					
	2010		2011		2012	
	KEPOLISIAN DAERAH	CR*)	KEPOLISIAN DAERAH	CR*)	KEPOLISIAN DAERAH	CR*)
1	Jawa Tengah	90,24	Jawa Tengah	109,41	Sulawesi Utara	101,72
2	Kalimantan Selatan	67.02	NTT	100.85	Kalimantan Selatan	85.53
3	Sulawesi Tenggara	65.15	Sulawesi Utara	95.72	Bali	82.58
4	Lampung	64.35	Sulawesi Tenggara	69.44	Jawa Tengah	82.42
5	Kalimantan Tengah	63.83	Bali	65.28	Bengkulu	77.86

*Keterangan : *) Clearance Rate*

Sumber : BPS, 2012

Perkembangan dari angka kejahatan di provinsi Jawa Tengah yaitu pada tahun 2010 jumlah kejahatan sebesar 19.645 kasus meningkat sebesar 8% menjadi 21.383 kasus. Pada tahun 2012 terjadi penurunan tetapi tidak terlalu besar yaitu hanya 2% menjadi 20.746 kasus kejahatan.

Gambar 1.2
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012



Sumber: Statistik Keamanan Jawa Tengah, 2012

Semakin besarnya presentase pada *clearance rate* tersebut sejatinya dapat menjadikan angka kejahatan di Provinsi Jawa tengah dapat ditekan. Ini dikarenakan bahwa ketika kinerja polisi cepat dalam menindak kejahatan yang dilaporkan itu dapat segera diselesaikan hal ini akan memperbesar resiko seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Tetapi hal ini tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kejahatan di Provinsi Jawa tengah dengan tingkat *clearance rate* terbaik dalam periode (2010-2011). Bila kita membandingkan data pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 menyiratkan bahwa peningkatan kinerja dari pihak kepolisian belum tentu berpengaruh terhadap tingkat kejahatan dalam arti lain bahwa para pelaku kejahatan tersebut bertindak tanpa memandang resiko bahwa jika kinerja polisi yang cepat akan meningkatkan probabilitas untuk ia ditangkap. Hal ini mungkin diakibatkan karena terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat mendorong para pelaku kejahatan tersebut sehingga cenderung berani melawan resiko.

Berdasarkan anggapan bahwa pelaku kejahatan dalam melakukan tindakannya sesuai dengan perhitungan yang rasional. Seorang yang akan masuk ke aktivitas ilegal pasti akan melakukan beberapa pertimbangan seperti Probabilita untuk ketahuan dan tertangkap, seriusitas penghukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendeknya terhadap hasil kejahatan. Berdasarkan model Becker memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan yang rasional akan melakukan kejahatan bila *expected cost* lebih rendah dari *expected benefits* dan akan menahan diri untuk melakukan kejahatan jika sebaliknya.

Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal tersebut karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal (Sullivan, 2007). Menurut strategi yang dianggap mampu menurunkan tingkat kriminalitas antara lain dengan meningkatkan ketegasan dalam hukuman yang akan diterima para kriminal atau dengan meningkatkan upah pekerjaan yang legal.

Salah satu cara meningkatkan upah tersebut adalah dengan meningkatkan pencapaian dalam hal pendidikan khususnya jumlah lulusan sekolah tinggi. Hal tersebut berguna untuk memperoleh keterampilan yang lebih sehingga nantinya dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Isaac Ehrlich (1973) (dalam Oliver, 2002) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi penduduk suatu negara, karena pendidikan membantu untuk menentukan manfaat yang akan diharapkan baik dari kegiatan legal maupun illegal.

Menurut Lochner (2007) mengatakan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa ketrampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas.

Tabel 1.2
Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota
Dengan Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2012

Pendidikan Tertinggi	Jumlah Penduduk		
	2010	2011	2012
Tdk/Blm Pernah Sekolah	2.632.710	2.376.455	2.225.777
Tidak/Blm Tamat SD	6.123.560	6.815.986	6.797.103
SD/Sederajat	11.188.208	11.013.955	10.866.050
SLTP/Sederajat	5.864.499	6.088.034	6.384.553
SLTA/Sederajat	4.977.214	4.867.163	5.383.119
Diploma I/II/III / Akademi/Universitas	1.596.465	1.485.284	1.613.605

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa tengah, 2012

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dilihat pada jumlah penduduk dengan tingkat pencapaian pendidikan dari SD hingga SLTP masih lebih besar daripada jumlah penduduk dengan tingkat pencapaian pendidikan dari SLTA hingga universitas. Bahkan masih besar pula jumlah penduduk yang tidak tamat sd maupun yang belum pernah merasakan pendidikan sama sekali. Hal ini yang mungkin berpotensi memicu tindak kejahatan dikarenakan ketersediaan waktu luang yang berlebih. Penelitian yang dilakukan oleh Tauchen dan Witte (1994) menunjukkan bahwa remaja yang menghabiskan waktunya untuk bekerja atau bersekolah memiliki peluang yang lebih kecil untuk melakukan tindak kriminalitas.

Pada dasarnya kebutuhan akan pendidikan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi individu ketika terjun pada pasar tenaga kerja. Tentunya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk masuk pada pasar tenaga kerja. Keterbatasan masyarakat untuk mengenyam pendidikan mengakibatkan sempitnya kesempatan kerja yang dimilikinya, sehingga hal itu akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran di suatu wilayah dimungkinkan akan meningkatkan angka kejahatan di wilayah tersebut. Wolpin (1978) dan Wong (1995) (dalam Hardianto, 2009) menyatakan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas suatu wilayah.

Tabel 1.3
Penduduk Jawa Tengah berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk
Pengangguran Terbuka Menurut kabupaten/Kota Dan Pendidikan Yang
Ditamatkan Tahun 2010-2012

Pendidikan Tertinggi	Jumlah Penduduk					
	2010	%	2011	%	2012	%
Tdk/Blm Pernah Sekolah	31283	3.0	51969	5.2	15727	1.6
Tidak/Blm Tamat SD	75227	7.2	93170	9.3	68431	7.1
SD/Sederajat	191927	18.3	119206	11.9	234097	24.3
SLTP/Sederajat	256912	24.5	294254	29.3	265010	27.5
SLTA/Sederajat	361092	34.5	342375	34.1	318870	33.1
Diploma I/II/III / Akademi/Universitas	130442	12.5	101688	10.1	60006	6.2
Total	1046883	100.0	1002662	100.0	962141	100.0
Pertumbuhan (%)			-4.22		-4.04	

Sumber: Sakernas Jawa tengah, 2012

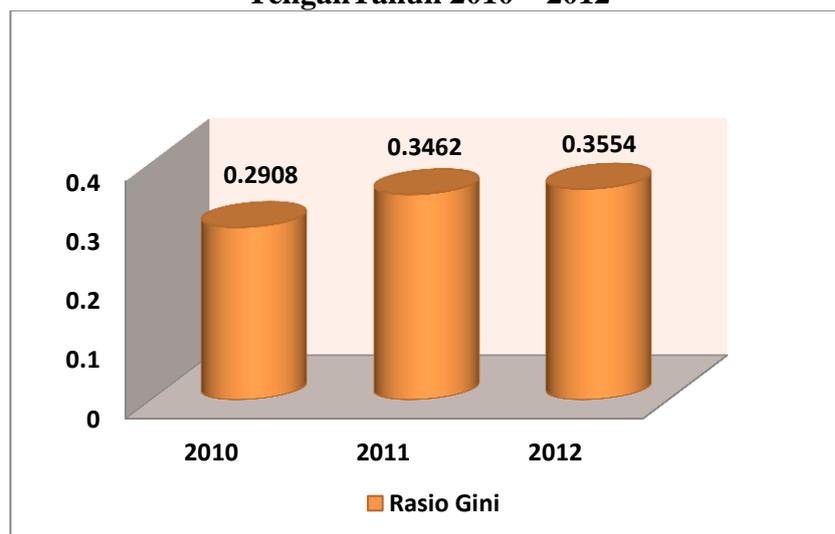
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di provinsi Jawa Tengah relatif mengalami penurunan. Jumlah pengangguran menurun sebesar 4,22% dengan jumlah 1.002.662 orang di tahun 2011 dari sejumlah 1.046.883 di tahun 2010. Kemudian jumlah pengangguran tersebut kembali mengalami penurunan di 4,04 % menjadi 962.141 di tahun 2012. Proporsi terbesar dari jumlah pengangguran adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA sederajat yaitu sebesar 33,1 % pada tahun 2012. Kemudian jumlah terbesar kedua adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dengan 27,5 % di tahun yang sama.

Menurunnya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah seharusnya ikut menurunkan tingkat kriminalitas daerah tersebut. Akan tetapi, tingkat kriminalitas di provinsi Jawa Tengah justru mengalami peningkatan. Levitt (1997) menemukan hubungan yang positif antara pengangguran dan kejahatan properti, termasuk pencurian, bahkan setelah dimasukkannya waktu dan area dalam dummy variabel. Tetapi ia juga melaporkan hubungan negatif antara pengangguran dan kejahatan kekerasan dalam beberapa kasus. Dalam sebuah studi menggunakan *time series data state*, ia menemukan hubungan yang kuat antara pengangguran dan kejahatan properti untuk keduanya yaitu remaja maupun orang dewasa, tetapi menemukan sedikit link antara pengangguran dan kejahatan kekerasan.

Pada dasarnya setiap individu mempunyai hasrat untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Akan tetapi, tidak semua individu mampu memenuhi semua kebutuhannya dan hal inilah yang memicu timbulnya tindak kriminalitas dalam

masyarakat. Perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin karena perbedaan tingkat pendidikan, menimbulkan kesenjangan pendapatan yang juga merupakan salah satu faktor pendorong tingginya tingkat kriminalitas. Berbagai studi menunjukkan keterkaitan yang kuat antara ketimpangan dan tingkat kriminal. Lederman *et al.* (2001) dalam (Indonesiasetara.org,2013) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan faktor penyebab tindakan kriminal, sehingga semakin timpang suatu kota atau negara semakin tinggi tingkat kriminalitasnya. Pandangan ini dikuatkan oleh Kennedy *et al.* (1998) dalam (Indonesiasetara.org,2013) yang mengatakan bahwa ketimpangan mendorong perilaku kriminal.

Gambar 1.3
Pemerataan Pendapatan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012



Sumber: *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jateng, 2012*

Gambar 1.3 memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya selalu meningkat selama periode 2010-

2012. Hal ini berarti bahwa adanya jarak yang nyata antara si kaya dan si miskin yang nantinya berpotensi memicu adanya tindak kejahatan.

Husnayain (2007) mengatakan bahwa usia 15-29 merupakan usia produktif untuk bekerja dan berpotensi pula untuk melakukan kejahatan dibandingkan dengan usia yang lain. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semakin besar persentase pria pada usia 15-29 tahun dalam sebuah provinsi maka semakin tinggi pula peluang provinsi tersebut memiliki tingkat kejahatan properti yang tinggi.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 – 2012

Kelompok Umur	Tahun		
	2010	2011	2012
0-4	2.729.858	2.823.479	2.917.797
5-9.	2.814.053	2.826.781	2.774.735
10-14.	3.027.778	3.269.291	3.293.750
15-19	2.535.562	2.532.875	2.548.498
20-24	2.069.252	2.281.899	2.332.242
25-29	2.464.320	2.747.525	2.734.811
30-34	2.503.179	2.493.247	2.515.228
35-39	2.474.035	2.456.922	2.568.460
40-44	2.399.555	2.361.155	2.375.493
45-49	2.292.692	2.344.643	2.368.839
50-54	1.965.627	1.931.854	1.946.307
55-59	1.509.032	1.433.204	1.450.581
60-64	1.104.249	1.096.368	1.184.419
65-69	858.140	835.486	761.888
70-74	754.516	700.091	678.712
75+	884.047	782.648	818.447

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan, 2012

Proporsi usia penduduk merupakan salah satu faktor demografis yang juga memungkinkan berpengaruh pada tingkat kejahatan di suatu daerah. Pada

umumnya proporsi usia yang terkait dengan tindak kriminal adalah u usia yang masih produktif. Stephen Machin dan Costas Meghir (2003) memasukan proporsi usia penduduk 15-29 tahun dalam populasi sebagai variabel penjelas, karena kebanyakan kejahatan relatif dilakukan oleh orang-orang muda dalam proporsi usia tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh argument Neny (2012) yang mengatakan bahwa pada usia 15-30 tahun pemikirannya masih dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang nampaknya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang tinggal di daerah manapun. Lingkungan masyarakat yang beragam dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Serta lingkungan yang padat dan sibuk dengan berbagai aktifitas memberikan kesempatan yang besar untuk suatu tidak kejahatan. Kejahatan menjadi masalah kompleks yang telah menjadi konsekuensi bagi masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum di suatu daerah. Kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini semakin beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, pemerkosaan, penyalahgunaan obat terlarang, kenakalan remaja, dan masih banyak yang lain. Umumnya tindak kejahatan konvensional dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifatnya. Dan yang paling sering didengar adalah jenis kejahatan hak milik atau yang biasa disebut kejahatan properti (*property crime*)

dan kejahatan kekerasan (*violence crime*). Kejahatan properti umumnya bertujuan untuk mengambil barang atau hak milik orang lain (korban). Dalam kepolisian, kejahatan properti mencakup antara lain: pencurian dengan pemberatan, Pencurian dengan kekerasan, perampokan, penjambretan, pembobolan rumah, dan pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan kejahatan kekerasan umumnya bertujuan untuk membahayakan bahkan juga sampai melukai fisik korban seperti, pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan berat.

Tabel 1.5
Jumlah Tindak Pidana Menonjol Di Jawa tengah Tahun 2010-2012

Tahun	Kejahatan Properti			Total	rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pencurian dg Pemberatan	Curanmor	curas		
2010	2387	1548	280	4215	18.89
2011	3262	2290	359	5911	
2012	2907	2377	482	5766	
	Kejahatan Kekerasan				
	Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan		
2010	79	104	763	946	-4.39
2011	49	107	371	527	
2012	67	66	439	572	
	Penyalahgunaan Narkoba				
	Narkotika	Psikotropika dan Obat Terlarang			
2010	559	364	923	-16.12	
2011	377	188	565		
2012	565	37	602		

Sumber: Statistik Keamanan Jateng, 2012

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010-2012 kejahatan properti selalu dominan selama tiga tahun terakhir dibanding jenis kejahatan lain. Kejahatan properti memiliki rata-rata pertumbuhan positif yang artinya cenderung

meningkat yaitu sebesar 18,89%. Sedangkan kejahatan jenislain memiliki rata-rata pertumbuhan negative yang artinya cenderung menurun, yaitu sebesar -4,39% pada kejahatan kekerasan (*violence crime*) dan -16,12% pada kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi tentu seharusnya dapat mendorong pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan guna menurunkan jumlah tindak kejahatan, salah satunya dengan menambahkan jumlah personil kepolisian.

Tabel 1.6
Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk Per Polisi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Polisi	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk/Polisi
2010	30.960	32.382.657	1.045
2011	30.529	32.643.612	1.069
2012	30.290	33.270.207	1.098

Sumber: Statistik Keamanan Jateng, 2012

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa jumlah personil kepolisian di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2010 jumlah polisi sebesar 30.960 personil menurun menjadi 30.529 personil di tahun 2011 dan menjadi 30.290 personil di tahun 2012. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan angka rasio penduduk per polisi menjadi meningkat. Pada tahun 2012 tercatat rasio penduduk per polisi adalah

sebesar 1.098, ini berarti satu orang personil polisi mengawasi sejumlah 1075 orang penduduk.

Motivasi untuk mencukupi kebutuhan mengakibatkan seseorang berani mengambil resiko untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan properti. Hal ini disebabkan karena hasil dari tindak kejahatan properti umumnya mempunyai nilai jual yang nantinya dapat digunakan untuk menutup kekurangan kebutuhan pribadi maupun keluarganya. Sehingga analisis kejahatan pada penelitian ini menggunakan jenis kejahatan properti dikarenakan karena jenis kejahatan tersebut penyebabnya lebih dimungkinkan oleh permasalahan ekonomi. Menyikapi hal tersebut diatas sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **“PENGARUH VARIABEL PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, RASIO GINI, USIA, DAN JUMLAH POLISI PERKAPITA TERHADAP ANGKA KEJAHATAN PROPERTI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2012”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang diatas dapat diketahui bahwa tingginya presentase *clearance rate* oleh pihak kepolisian belum mampu menekan angka kejahatan. Ketika angka *clearance rate* meningkat hal tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan. Hal tersebut seharusnya menjadi pandangan resiko pada seseorang yang akan melakukan kejahatan karena resiko tertangkap akan semakin besar. Tetapi itu tidak berpengaruh pada kejahatan di Provinsi Jawa Tengah yang semakin meningkat.

Penduduk di Provinsi Jawa Tengah menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2010-2012 masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah yaitu penduduk dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Lebih parahnya lagi juga masih banyak penduduk yang belum pernah merasakan pendidikan sama sekali. Menurut Lochner (2007) mengatakan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat disimpulkan bahwa ketrampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan seseorang dengan pendidikan tinggi. Waktu luang yang dimiliki oleh orang yang rendah pendidikan akan lebih banyak dibandingkan orang yang tinggi pendidikan. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi untuk melakukan tindak kriminalitas.

Tingkat pengangguran yang kebanyakan diisi oleh penduduk yang masih berusia produktif di Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan. Hal ini seharusnya ikut menurunkan angka kejahatan di provinsi tersebut karena sejatinya tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap angka kejahatan. Kemudian Perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin menimbulkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat yang juga merupakan salah satu faktor pendorong tingginya tingkat kriminalitas.

Kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini semakin beragam jenisnya. Namun jika dibandingkan dengan bentuk tindak kejahatan yang lain jenis kejahatan properti selalu dominan terhadap tindak pidana menonjol di Jawa tengah. Dan dari periode tahun 2010-2012 tindak kejahatan properti juga terus mengalami kenaikan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.5. Kemudian Upaya

nyata juga terus dilakukan pihak kepolisian dengan terus menambah jumlah personil. Hal ini bertujuan untuk menekan angka tindak kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dan juga memberi efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel pendidikan terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh variabel rasio gini terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh variabel usia terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh variabel polisi perkapita terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendidikan terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel pengangguran terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel rasio gini terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel usia terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk menganalisis pengaruh variabel polisi perkapita terhadap angka kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan maupun wawasan penulis tentang faktor-faktor ekonomi seperti pendidikan, pengangguran, rasio gini, kemudian faktor demografi yaitu proporsi usia, maupun faktor pencegahan (*deterrence*) yaitu jumlah polisi perkapita yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran maupun informasi kepada masyarakat mengenai kondisi kerawanan di provinsi Jawa Tengah akibat ancaman tindak kejahatan properti.

3. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang efektif untuk setidaknya dapat menekan angka kejahatan property di Provinsi Jawa Tengah.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat digunakan menjadi dasar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengapa tingkat kejahatan properti di Provinsi Jawa tengah menjadi menarik untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Teori yang digunakan merupakan teori yang berpijak pada ekonomi mikro, dan ekonomi pembangunan, bahasan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Selain itu disusun juga kerangka pemikiran penulis tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis regresi.

Bab IV : Hasil Dan Analisis

Bab ini menjelaskan secara singkat keadaan wilayah Kota Semarang sebagai objek penelitian, kemudian menuju ke analisis data dan pembahasan hasil analisis.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan berkaitan tentang tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Definisi Kejahatan

Menurut Kartini Kartono (1992) (dalam Hardianto, 2009) menyebutkan bahwa kejahatan secara yuridis merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosiatif sifatnya, dan melanggar hukum serta undang undang pidana. Kemudian secara sosiologis, kriminalitas adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Menurut pandangan dari ilmu kriminologi kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan

terhadap properti dan perlindungan terhadap penderitaan orang lain. Meskipun begitu, moral dasar ini dapat berbeda berdasarkan waktu dan komunitas (Adler, Mueller, dan Laufer, 2001). Definisi lain dalam kriminologi mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang sangat merusak sehingga dilarang oleh undang-undang kejahatan (Barkan, 2005). Kejahatan oleh kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: kejahatan dengan kekerasan, kejahatan properti, kejahatan terorganisir, dan kejahatan melawan ketertiban publik.

Dalam pandangan ekonomi sendiri kejahatan merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumberdaya dan mendistorsi harga sehingga jumlahnya harus ditekan. Kemudian juga memandang para kriminal sama dengan individu lainnya. Mereka akan melakukan tindak kriminalitas jika keuntungan yang diterima lebih besar nilainya dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya yang dikeluarkan mereka mampu menilai seberapa besar tingkat kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan tindak non kriminal. Dalam penerapannya, analisis ekonomi kejahatan lebih banyak menggunakan data kejahatan properti, yaitu kejahatan atas harta benda. Antara lain yaitu: pencurian, perampokan, pembobolan rumah, dan lain-lain.

2.1.2. Anggapan Rasionalitas Kejahatan

Rasionalitas merupakan suatu pertimbangan atas kesadaran terhadap suatu pilihan bagi seseorang untuk bertindak atas dasar preferensi (nilai, utilitas). Setiap orang berusaha memaksimalkan benefit dan meminimumkan resiko dan aspek aspek yang menjadi pertimbangan dalam tindakan rasional adalah :

1. Kelangkaan sumber daya
2. Biaya oportunitas
3. Norma norma institusional
4. Akses informasi

Pendekatan rasionalitas pada dasarnya digunakan dalam hal pengambilan suatu keputusan. Dengan pendekatan rasionalitas aka diharapkan mampu untuk meramalkan secara tepat akibat-akibat dari pilihan atau keputusannya tersebut sehingga dapat memperhitungkan asas biaya manfaatnya serta mempertimbangkan beberapa masalah yang saling berkaitan.

Dalam hal kejahatan pendekatan rasionalitas juga digunakan untuk mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut untung rugi yang ia dapatkan dari pengambilan keputusan untuk masuk ke aktivitas kriminal. Keputusan melakukan kejahatan adalah keputusan yang rasional karena didasarkan atas maksimisasi utilitas. Seorang yang akan masuk ke aktivistas illegal pasti akan melakukan beberapa pertimbangan seperti Probabilita untuk ketahuan dan tertangkap, seriusitas penghukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendeknya terhadap hasil kejahatan.

Becker (1968) dalam (Ulen, 1999) menjelaskan model dari keputusan seseorang untuk ikut ke aktivitas illegal. Hipotesis Becker bahwa kejahatan adalah perhitungan yang rasional, karena itu seorang pelaku kejahatan akan membuat keputusan yang disesuaikan dengan hukum atas kehjahatan sebagai basis

perbandingan ekspektasi untung rugi dari perbuatan legal dan illegal. Perkiraan biaya kejahatan adalah hasil perhitungan probabilitas dari aktivitas yang terdeteksi dan dari pelaku yang ditangkap dan dihukum, serta nilai kerugian materil dari sanksi hukuman dan nilai kerugian non materil yang mungkin diderita, seperti kerugian dalam reputasi yang dicap sebagai seorang kriminal. Kemudian perkiraan keuntungan dari kejahatan dihitung dari probabilitas keberhasilan memperoleh keuntungan materil maupun non materil pada kejahatan tertentu. Ini mencakup baik nilai barang atau jumlah uang yang dihasilkan secara langsung dari kejahatan. Dan yang tidak berwujud tetapi berpotensi memiliki nilai seperti dapat dikenal oleh orang-orang yang dalam komunitas para pelanggar hukum. Berdasarkan model Becker bahwa pelaku kejahatan yang rasional akan melakukan kejahatan bila *expected cost* lebih rendah dari *expected benefits* dan akan menahan diri untuk melakukan kejahatan jika sebaliknya itu terbukti.

Tidak jauh berbeda dengan model yang dijelaskan Becker, rasionalitas kejahatan menurut Sullivan (2003) juga menjelaskan bahwa ada tiga alasan seseorang melakukan tindak kejahatan properti: pertama, beberapa orang secara relatif sangat pandai melakukan tindak kriminal sehingga kemungkinan untuk tertangkap sangat kecil sementara ekspektasi harta rampasannya sangat besar. Kedua, karena mereka memiliki *opportunity cost* yang sangat rendah sehingga tidak menjadi masalah saat mereka harus kehilangan waktu mereka karena dipenjara, contohnya orang miskin yang hidup bergelandang dan tidak memiliki pekerjaan. Ketiga, karena mereka memang tidak memiliki rasa hormat terhadap norma-norma dalam masyarakat dan tidak menganggap bahwa tindak kejahatan

adalah hal yang salah, sehingga tidak masalah baginya jika hanya mendapatkan hasil yang sedikit.

2.1.2.1. Tingkat Keseimbangan Kejahatan

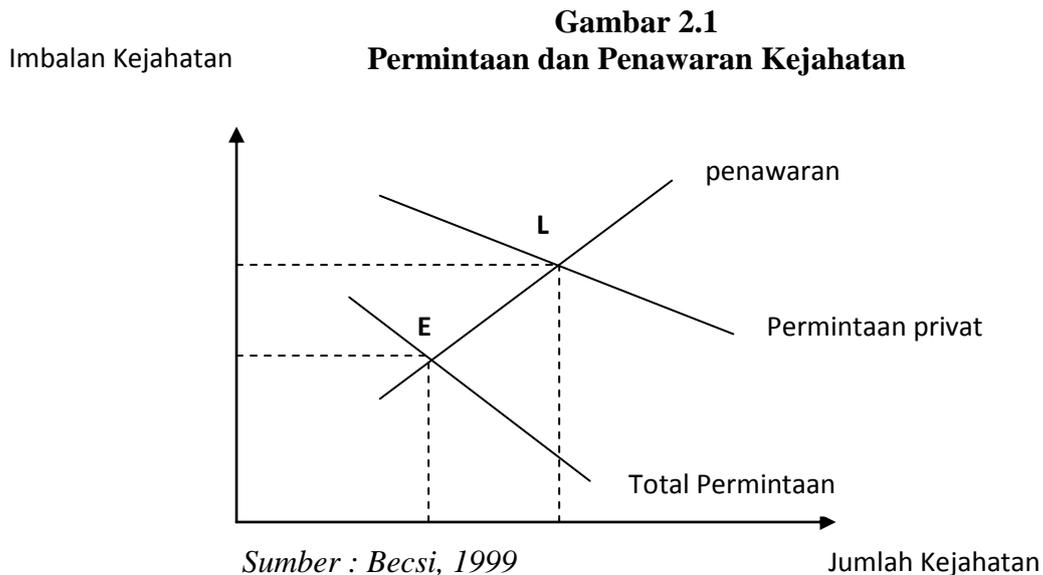
Berdasarkan dari kebanyakan model ekonomi kejahatan mencoba mengasumsikan siapa saja pelaku atau aktor yang dapat membuat pilihan ekonomi yang rasional. Biasanya terdapat tiga set aktor yaitu pelaku kejahatan, rumah tangga non kriminal, dan pemerintah. Pada kerangka sederhana, pelaku kejahatan menjelaskan penawaran kejahatan, sisanya masyarakat menjelaskan permintaan kejahatan (perlindungan), kemudian pemerintah mempengaruhi keduanya (secara langsung pada permintaan dan secara tak langsung pada penawaran).

Penawaran kejahatan adalah pilihan antara aktivitas legal atau bekerja di satu sisi dan aktivitas illegal di sisi yang lain. Pilihan tersebut tergantung pada imbalan kejahatan (hasil dari tindak kejahatan tersebut), dimana imbalan kejahatan itu sendiri harus diatas dari seluruh biaya lain lain terkait dengan kejahatan. Biaya kejahatan termasuk hilangnya pendapatan dari pekerjaan yang legal, biaya langsung dari kejahatan, ekspektasi hukuman dari kejahatan tersebut (termasuk denda, penangkapan, dan sanksi lainnya). Ehrlich (1996) mengungkapkan bahwa penawaran kejahatan terbentuk karena beberapa faktor, antara lain; ekspektasi harta rampasan, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata-rata di pasar kerja yang legal, peluang ditangkap, dan selera tiap individu dalam melakukan kejahatan. Faktor faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva penawaran adalah faktor demografi (perubahan proporsi pemuda), kesempatan pekerjaan yang sedikit dalam tingkat upah tertentu, dan

perubahan kebijakan pemenjaraan. Pendidikan dan kesejahteraan mungkin juga dianggap dapat meningkatkan *opportunity cost* dalam melakukan tindak kejahatan terkait kenaikan pendapatan dari pekerjaan yang legal (Becsi, 1999).

permintaan kejahatan merupakan permintaan untuk perlindungan dan asuransi dari individu atau masyarakat yang mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kejahatan. hubungan negatif timbul diakibatkan karena tindak kejahatan mendorong individu untuk meningkatkan usaha perlindungan sendiri (mengunci pintu, merekrut personel keamanan, dan sebagainya), yang dimana tindakan tersebut akan meningkatkan biaya langsung dari kejahatan dan menurunkan imbalan kejahatan.

Aktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keseimbangan kejahatan adalah pemerintah. Pemerintah berusaha untuk menyamakan biaya marjinal untuk kejahatan menjadi manfaat sosial marjinal dari tambahan uang yang dihabiskan untuk pencegahan kejahatan apapun jenisnya. Usaha dari pemerintah dalam mencegah kejahatan dapat dijadikan sebagai komponen dari kurva permintaan. Permintaan publik (permintaan publik untuk perlindungan) dari kejahatan juga memiliki *slope* yang negative terhadap kejahatan. Karena jika kejahatan meningkat sektor publik akan menanggapi dengan meningkatkan usaha untuk menekan kejahatan, yang akhirnya meningkatkan biaya kejahatan dari para pelaku kejahatan tersebut. Khususnya, ekspektasi biaya jika tertangkap meningkat maka hasil dari kejahatan akan menurun. Oleh karena itu terdapat hubungan yang terbalik antara imbalan atau hasil kejahatan dan tingkat kejahatan dengan sisi permintaan publik.



Keseimbangan tingkat kejahatan ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran yang ditunjukkan pada titik E dimana itu bergeser ke kiri dari titik L. pengaruh eksogen akan menggeser keseimbangan, dimana kekuatan pengaruh tersebut ditentukan dari elastisitas kurva permintaan dan penawaran. Kurva total permintaan adalah penjumlahan dari permintaan privat/individu dan permintaan publik. Kurva permintaan total berada dibawah kurva permintaan privat dikarenakan kombinasi dari usaha publik dan privat dalam mencegah tindak kejahatan.

Kurva cenderung lebih elastis atau datar karena lebih banyak kesempatan substitusi terjadi. Peningkatan pada tingkat hukuman atau penangkapan pelaku kejahatan menurunkan penawaran, dan keseimbangan juga turun. Akan tetapi pelaku kejahatan yang ditangkap akan digantikan digantikan oleh pelaku kejahatan yang baru, tergantung pada kekuatan efek pencegahan dari hukuman. Jika efek pencegahan itu lemah maka individu akan mudah bersubstitusi pada kegiatan kriminal dan mungkin kejahatan tidak bisa turun secara signifikan.

2.1.2.1.1. Penawaran Pelanggaran (*supply of offense*)

Becker (1968) pertama kali mengemukakan suatu model fungsi kerugian sosial (*social-loss function*) untuk menjelaskan kerugian masyarakat sebagai akibat adanya perbuatan kriminal. Selengkapnya, fungsi kerugian sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$L = D(O) + C(p,O) + b p f O \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

L : total kerugian sosial

D(O) : biaya kerusakan

C(p,O) : kerugian social dari hukuman

(O) : jumlah pelanggaran

p : rasio kejahatan yang diselesaikan terhadap total kejahatan

bf : kerugian social per pelaku yang dihukum (biaya dari hukuman)

f : hukuman per pelanggar bagi mereka yang dihukum

b : nilai koefisien berdasarkan jenis hukuman

Berdasarkan fungsi tersebut, Becker berusaha menjelaskan bahwa perbuatan kriminal/ illegal yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang disebut sebagai kerugian sosial (*social-loss*). Total kerugian sosial akibat perbuatan illegal merupakan hasil penjumlahan dari biaya kerusakan (D(O)), biaya penangkapan (C(p,O)), dan biaya kerugian sosial akibat hukuman (bpfO) yang muncul akibat adanya perbuatan illegal. Guna meminimumkan total kerugian sosial akibat adanya perbuatan kriminal, upaya yang dapat dilakukan adalah mengendalikan nilai rasio kejahatan yang

diselesaikan terhadap total kejahatan (p), hukuman per pelanggar bagi mereka yang dihukum (f), dan jumlah pelanggar (O).

Seorang individu berpartisipasi dalam perbuatan kriminal/illegal apabila *expected utility* yang diperoleh dengan menggunakan waktu dan sumber daya lain untuk kegiatan illegal lebih besar daripada *expected utility* yang didapat dengan menggunakan waktu dan sumber daya tersebut untuk kegiatan legal. Kemudian, beberapa orang menjadi kriminal bukan karena motivasi awal di antara mereka yang berbeda, namun karena manfaat (*benefit*) dan biayanya (*cost*) yang berbeda.

Berdasarkan rumusan di atas, Becker (1968) kemudian mengembangkan suatu fungsi yaitu *supply of offense*. Fungsi ini menghubungkan antara jumlah pelanggar dengan probabilitas ditangkap, hukuman jika tertangkap, dan variabel-variabel lain seperti pendapatan dari aktivitas legal dan illegal, frekuensi gangguan penangkapan, dan kesediaan bertindak illegal. Fungsi *supply of offense* yang dikembangkan Becker dapat dituliskan dalam persamaan (2.2) berikut ;

$$O_j = O_j(p_j, f_j, u_j) \dots\dots\dots (2.2)$$

dengan, O_j merupakan jumlah tindakan kriminal selama periode tertentu, p_j adalah kemungkinan tertangkapnya kriminal untuk suatu tindakan kriminalitas, f_j adalah hukuman dari suatu tindakan kriminal, dan u_j adalah variabel lain yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal.

Peningkatan kemungkinan tertangkapnya kriminal untuk suatu tindakan kriminal (p_j) dan hukuman dari suatu tindakan kriminal (f_j) akan mengurangi *expected utility* dari suatu tindak kriminalitas yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah tindakan kriminal pada periode tersebut. Becker (1968) juga

menjelaskan variabel-variabel lain yang masuk dalam uji adalah peningkatan pendapatan dari aktivitas legal atau peningkatan kesadaran hukum yang akan mengurangi intensif untuk melakukan perbuatan illegal.

2.1.2.2. Pendidikan

Menurut Todaro (2004) bahwa permintaan akan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang bagi siswa itu sendiri maupun keluarganya serta biaya-biaya pendidikan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan/ keluarganya. Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditemukan oleh proses politik, yang seringkali tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi.

Pada dasarnya pendidikan merupakan hal yang penting dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan memunculkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi juga, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Layaknya yang di kemukakan oleh Lucas dan Romer dalam Teori Pertumbuhan Endogenya bahwa didalamnya menjelaskan akan pentingnya pendidikan terhadap tingkat pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara (Amalia, 2012).

2.1.2.2.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kejahatan

Penelitian yang dilakukan oleh Lochner (2007) ada hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan tingkat kejahatan. Pertama, pendidikan yang tinggi dapat membawa atau memperoleh pekerjaan yang legal. Kedua, seseorang yang berpendidikan tinggi akan cenderung berfikir untuk bertindak kriminal, karena manfaat yang terlalu kecil. Jadi pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi tindak kejahatan melalui peningkatan upah.

Lochner (2007) juga berargumen bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa ketrampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas.

Analisis yang dilakukan oleh Ehrlich (1973) dalam Oliver (2002) pendidikan merupakan hal yang penting bagi penduduk suatu negara, karena pendidikan membantu untuk menentukan manfaat yang akan diharapkan baik dari kegiatan legal maupun illegal. Sejauh ini bahwa pendidikan membuat individu lebih menghindari resiko, hal ini akan cenderung untuk mencegah kejahatan.

2.1.2.3. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Amalia, 2012). Pengangguran merupakan suatu ukuran yang

dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara efektif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999) (dalam Farid Alghofari, 2010).

Pengangguran menurut Sadono Sukirno (2001) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Kenaikan produksi yang dilakukan oleh para pengusaha karena tingginya permintaan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, semakin tingginya pendapatan nasional, semakin banyak pula tenaga kerja dalam perekonomian. Faktor lain yang menimbulkan (i) pengangguran antara lain karena penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, (ii) pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, (iii) ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis (Sadono Sukirno, 2001) :

a. Pengangguran friksional atau pengangguran normal

Ketika perekonomian terus tumbuh dan mengalami perkembangan yang pesat maka jumlah dan tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah. Pada akhirnya perekonomian akan mampu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh yakni di bawah 4% dan pengangguran yang berlaku dinamakan pengangguran friksional atau

pengangguran normal. Pengangguran ini bukanlah wujud dari ketidakmampuan mendapat pekerjaan, tetapi sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik.

Apabila perekonomian semakin membaik dan tingkat pengangguran semakin rendah, maka para pengusaha tentunya akan semakin kesulitan untuk melakukan penyerapan tenaga kerja guna meningkatkan produksi mereka. Keadaan seperti ini akan memicu para pekerja untuk menuntut gaji mereka. Selain itu, akan didapati pula keadaan dimana segolongan tenaga kerja mulai meninggalkan pekerjaan lama mereka dan mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja tersebut mereka tentu akan menganggur sementara, dan sifat menganggur ini tidak serius.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian dan kegiatan perekonomian sebagai akibat dari perkembangan ekonomi. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya pengangguran struktural yaitu, (i) akibat dari kemerosotan permintaan, dan (ii) sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Pengangguran yang diakibatkan oleh faktor ke dua atau karena kemajuan teknologi yang digunakan pengusaha akan menimbulkan pengangguran teknologi.

c. Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang timbul oleh perubahan-perubahan kegiatan perekonomian. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, maka pengusaha akan mengurangi penggunaan mesin produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Sehingga kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang terus bertambah sebagai akibat dari penambahan penduduk dengan tidak diikuti perkembangan perekonomian yang semakin membaik, maka pengangguran konjungtur akan bertambah serius.

Untuk mengatasi pengangguran ini bukan hanya menunggu perkembangan perekonomian yang membaik tetapi juga dengan menyediakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja. Pengangguran konjungtur hanya dapat diatasi masalahnya apabila pertumbuhan ekonomi yang berlaku setelah kemunduran ekonomi adalah cukup teguh dan dapat menyediakan kesempatan kerja baru yang lebih besar dari penambahan tenaga kerja yang berlaku.

Pengangguran juga menimbulkan akibat buruk dan dibedakan menjadi dua aspek :

i. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tujuan setiap negara adalah memaksimalkan kemakmuran masyarakatnya dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang teguh. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk

mencapai tujuan tersebut. Dapat kita lihat akibat-akibat buruk yang ditimbulkan pengangguran terhadap kegiatan perekonomian :

- Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Karena pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya.
- Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang rendah juga akan menimbulkan dampak terhadap pendapatan pajak pemerintah yang juga ikut rendah. Dengan demikian pengangguran akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan.
- Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pengangguran menimbulkan dampak yang buruk terhadap sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga buruh akan diikuti oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan perusahaan akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh pengusaha. Menurunnya keuntungan akan mengurangi keinginan pengusaha untuk berinvestasi. Dan kedua hal tersebut tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

ii. Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat

Beberapa keburukan yang ditimbulkan oleh pengangguran terhadap individu dan masyarakat di sekitarnya antara lain :

- Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Berbeda dengan negara maju, dimana para pengangguran di sana tetap diberikan asuransi untuk melanjutkan kehidupannya. Sedangkan di negara berkembang, mereka harus membiayai kehidupan selanjutnya dan bergantung pada tabungan masa lalu atau pinjaman.
- Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Karena keterampilan akan tetap hidup bila terus dipraktikkan atau digunakan. Sehingga pengangguran dalam periode yang sangat lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja semakin merosot.
- Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan perekonomian yang lesu dan pengangguran yang tinggi akan mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah, dan adakalanya akan diikuti oleh demonstrasi dan huru-hara. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal (pencurian dan perampokan) juga akan meningkat.

2.1.2.3.1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kejahatan

Orang yang menganggur dan tidak berpenghasilan berarti tidak memiliki ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal. Karena itulah kecenderungan melakukan kejahatan orang yang menganggur lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja. Sehingga pengangguran secara teori memiliki hubungan positif dengan kejahatan properti. Ini dibuktikan oleh 63 penelitian pada tahun 1970-an di Amerika. Kemudian Chiricos (1987) membuktikan pula bahwa analisis 63 data tersebut konsisten menunjukkan hubungan positif dan signifikan.

Tauchen dan Witte (1994) (dalam Groot dan Brink, 2007) menemukan bahwa kaum muda yang bekerja dengan upah atau pergi ke sekolah adalah kecil kemungkinan untuk melakukan tindak kriminal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Melick (2003) disebutkan bahwa secara historis terdapat dua pemikiran umum yang utama mengenai hubungan antara pengangguran dengan kejahatan. Pemikiran pertama berfokus pada “*supply of offenders*” dan pemikiran yang kedua berfokus pada “*supply of victims*”. Salah satu gagasan dasarnya adalah individu dalam rangka untuk mempertahankan standar hidup tertentu, maka selama dia menjadi pengangguran akan menjadi lebih mungkin untuk melakukan tindak pidana.

Levitt (1997) menemukan hubungan yang positif antara pengangguran dan kejahatan properti, termasuk pencurian, bahkan setelah dimasukkannya waktu dan area dalam dummy variabel. Tetapi ia juga melaporkan hubungan negatif antara pengangguran dan kejahatan kekerasan dalam beberapa kasus. Dalam sebuah studi menggunakan *time series data state*, ia menemukan hubungan yang

kuat antara pengangguran dan kejahatan properti untuk keduanya yaitu remaja maupun orang dewasa, tetapi menemukan sedikit link antara pengangguran dan kejahatan kekerasan.

2.1.2.4. Distribusi Pendapatan

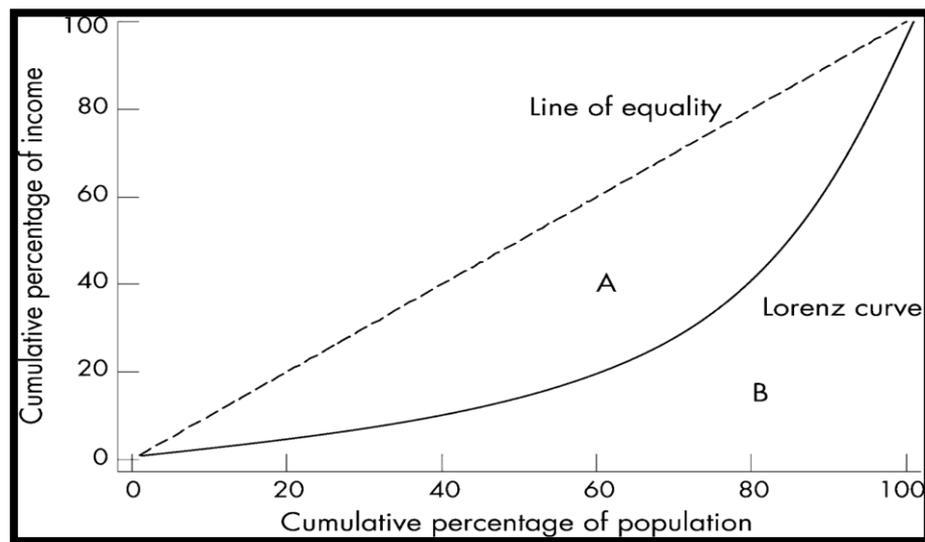
Ketimpangan distribusi pendapatan ini umumnya merupakan salah satu inti permasalahan dalam negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan perseorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Todaro & Smith, 2004). Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini, kriteria Bank Dunia, dan Kurva Lorenz. Penghitungan dengan menggunakan indeks gini memiliki rasio antara 0 dan 1. Bila indeks gini sama dengan 0 berarti terjadi distribusi pendapatan yang sempurna merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Akan tetapi, apabila indeks gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja.

Namun, apabila kita menggunakan kriteria Bank Dunia, maka dasar penilaian distribusi pendapatan adalah besarnya pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan tersebut dikategorikan tinggi, apabila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12%

bagian pendapatan. Ketimpangan juga dapat dikategorikan sedang jika 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan, dan ketimpangan dikategorikan rendah jika 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Gambar 2.2
Kurva Lorenz



Sumber : Todaro, 2006

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif dan diperkenalkan pertama kali oleh Max Otto Lorenz di tahun 1905 (Setiawan, 2011). Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Sisi vertikalnya menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi horisontalnya menggambarkan persentase kumulatif populasi.

2.1.2.4.1. Pengaruh Kesenjangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kejahatan

Teori Becker menjelaskan bahwa faktor kesenjangan pendapatan menempatkan orang yang mendapatkan upah rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta berharga sangat tinggi pada satu daerah. Hal tersebut akan meningkatkan *return* dari aksi kejahatan di daerah tersebut sehingga tingkat kejahatan akan tinggi daerah tersebut. Sedangkan teori strain berpendapat bahwa perasaan frustrasi akan menghinggapi orang-orang yang tidak sukses ketika berhadapan dengan orang-orang sukses di sekitarnya. Semakin besar kesenjangannya, akan semakin besar rasa frustrasi tersebut sehingga akan memperbesar godaan untuk melakukan tingkat kejahatan. Freeman (1996) menemukan hubungan positif antara kejahatan dengan kesenjangan sosial, makin tinggi kesenjangan sosial maka semakin besar kejahatan properti yang terjadi. Begitu juga dengan Ehrlich (1996) menemukan signifikansi distribusi pendapatan terhadap kejahatan dengan hubungan yang positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Madden dan Chiu (1998) (dalam Baharom dan Habibullah, 2009) menyajikan model yang menelusuri hubungan yang potensial antara buruknya ketimpangan pendapatan dan meningkatnya jumlah pencurian, dan hasil terkuat menunjukkan bahwa peningkatan perbedaan ketimpangan secara relatif meningkatkan tingkat kriminalitas. Brush (2007) juga menemukan bahwa dengan meregresi data cross section dan time series dari Negara Amerika Serikat ternyata menghasilkan output yang berbeda. Data cross section menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dengan tingkat

kejahatan mempunyai hubungan yang positif, sedangkan dengan meregresi data time series keduanya justru memiliki hubungan yang negatif.

2.1.2.5. Konsep Kependudukan

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu secara umum diklasifikasikan menurut (Adioetomo dan Samosir, 2011) :

1. Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak
2. Karakteristik sosial, seperti tingkat pendidikan dan status perkawinan
3. Karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan
4. Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, provinsi, dan kabupaten

Berdasarkan konsep karakteristik demografi, ciri utama yang digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk adalah berdasarkan umur dan jenis kelamin. Secara umum, distribusi umur penduduk dikelompokan menurut umur satu tahunan atau lima tahunan. Namun, bisa juga pengelompokan penduduk menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah.

Selain distribusi umur penduduk, dalam analisis demografi dikenal pula struktur umur penduduk yang dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu (Adioetomo dan Samosir, 2011) :

1. Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun
2. Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-59 tahun
3. Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas
(berdasarkan ketetapan WHO)

2.1.2.5.1. Pengaruh Usia Terhadap Tingkat Kejahatan

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Witte (1997) dalam (Witte dan Witt, 2000) yang menunjukkan bahwa “hanya 50 sampai 60 persen laki-laki muda telah terlibat dalam tindakan nakal pada saat mereka berusia 18 dan kurang dari 10 persen telah ditangkap pada usia 30”. Moffit (1993) dalam (Witte dan Witt, 2000) juga menambahkan “angka aktual perilaku ilegal sejauh ini begitu tinggi selama masa remaja bahwa partisipasi dalam kenakalan tampaknya menjadi bagian normal dari kehidupan remaja”. Machin dan Meghir (2004) pun mengungkapkan bahwa sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda dan kemungkinan akan berkorelasi negatif dengan ukuran upah.

Menurut Husnayain (2007) Usia 15 – 29 adalah usia produktif untuk bekerja dan berpotensi besar untuk melakukan kejahatan dibandingkan usia dan jenis kelamin lainnya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa semakin tinggi persentase pria pada usia 15 – 29 tahun dalam sebuah provinsi maka semakin tinggi pula peluang provinsi tersebut memiliki tingkat kejahatan properti yang tinggi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Zsolt Becsi (1999) yang berjudul "*Economics And Crime In The States*". Menggunakan variabel independen kepadatan penduduk usia 15 – 19 tahun dan usia 20 – 24 tahun, pengangguran, pendapatan seseorang, pendidikan, tahanan, pengeluaran polisi, dan jumlah polisi dengan variabel dependen adalah tingkat kejahatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang terkait dengan ekonomi pengangguran dan pendapatan personal terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan di Amerika. kemudian variabel yang terkait dengan demografi menunjukkan bahwa variabel usia berpengaruh terhadap tingkat kejahatan di Amerika. dan tiga variabel terkait dengan faktor pencegahan semuanya terbukti signifikan terhadap tingkat kejahatan di Amerika.
2. Penelitian oleh Alison Oliver (2002) yang berjudul "*The Economics of Crime: An Analysis of Crime Rates in America*" yang menggunakan tiga variabel independen yakni, variabel ekonomi, *deterrence variables*, serta variabel demografi dan satu variabel dependen yaitu tingkat kriminalitas di Amerika. Untuk variabel ekonomi, Oliver menggunakan jumlah siswa yang mampu menyelesaikan sekolah menengah, jumlah siswa yang terdaftar pada sekolah menengah, jumlah GDP perkapita, indeks gini, dan tingkat pengangguran. Sedangkan untuk variabel yang mempengaruhi, Oliver menggunakan banyaknya polisi/angka polisi perkapita, penduduk yang dipenjara, selisih

kejahatan perkapita. Serta untuk variabel demografi, yang digunakan adalah persentase populasi yang berumur di bawah 25 tahun. Hasil yang didapatkan adalah bahwa variabel pendidikan, persentase penduduk yang terdaftar dalam sekolah menengah, pendapatan nasional, indeks gini, dan jumlah penduduk yang di penjara semuanya merupakan variabel yang cenderung mempengaruhi tingkat kriminalitas. Sedangkan peningkatan pengangguran juga dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, akan tetapi hasil regresi menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan

3. Penelitian oleh Stephen Machin dan Costas Meghir (2004) yang berjudul “*Crime and Economic Incentives*” dengan menggunakan variabel independen seperti tingkat upah riil, penduduk berusia 15-24 tahun, dan jumlah kepolisian daerah. Untuk kemudian di analisis dengan variabel dependennya yaitu tingkat kriminalitas di United Kingdom. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah tingkat kejahatan akan lebih tinggi apabila tingkat ketimpangan juga tinggi, yang mencerminkan peluang pasar tenaga kerja lebih rendah, begitu juga dengan kemungkinan tertangkap yang lebih rendah, di mana tingkat kejahatan sudah lebih tinggi, dan potensi keuntungan untuk kejahatan juga semakin tinggi.
4. Penelitian oleh Lance Lochner (2007) yang berjudul “*Education and Crime*” dengan menggunakan variabel independen yaitu pendidikan dan variabel dependennya yaitu tingkat kriminalitas. Secara empiris, meningkatnya tingkat pendidikan dapat menurunkan tindak kekerasan dan kejahatan properti secara signifikan.

5. Penelitian oleh Husnayain (2007) yang berjudul “Analisis Ekonomi Kejahatan” di Indonesia. Menunjukkan bahwa Variabel yang terbukti signifikan mempengaruhi kejahatan properti di Indonesia adalah pendapatan yang menggunakan data upah provinsi, pengangguran, proporsi pria usia 15 – 29 tahun dalam populasi, dan tingkat penyelesaian kasus oleh polisi. Sedangkan kekuatan polisi dan koefisien gini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kejahatan properti. Provinsi dengan tingkat upah rata-rata yang tinggi memiliki kecenderungan tingkat kejahatan properti yang tinggi dibandingkan tingkat kejahatan properti sedang dan rendah. Sedangkan setiap peningkatan tingkat pengangguran terbukti signifikan memiliki kecenderungan tingkat kejahatan properti yang tinggi. Begitu juga dengan tingkat penyelesaian kasus yang merefleksikan peluang tertangkap (PAP) dan proporsi penduduk. meningkatkan kecenderungan tingkat kejahatan properti yang tinggi daripada rendah dan sedang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Zsolt Becsi (1999) <i>Economics and Crime in the States</i>	Var. Dependen : Tingkat kejahatan Var. Independen : Kepadatan penduduk; usia 15 – 19 tahun; usia 20 – 24 tahun; pengangguran; pendapatan seseorang; pendidikan; tahanan; pengeluaran polisi; jumlah polisi	Regresi Panel	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kepadatan penduduk memiliki hubungan positif dan tidak signifikan - Variabel usia memiliki hubungan positif dan signifikan - Variabel pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan - Variabel pendapatan personal memiliki hubungan positif dan signifikan - Variabel kesejahteraan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan - Variabel pendidikan memiliki hubungan positif dan tidak signifikan - Variabel narapidana memiliki hubungan negatif dan signifikan - Variabel pengeluaran polisi memiliki hubungan positif dan signifikan - Variabel personel kepolisian memiliki hubungan positif dan signifikan
2	Alison Oliver (2002) <i>The Economics</i>	Var. Dependen : Tingkat Kejahatan Var. Independen : Variabel	Menggunakan Metode OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Regresi I : (Variabel Ekonomi) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lulusan sekolah menengah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan

	<p><i>of Crime: An Analysis of Crime Rates in America</i></p>	<p>Ekonomi; Variabel Pencegah; Variabel Demografi</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang terdaftar sekolah menengah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan • GDP perkapita memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan • Indeks Gini memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan • Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan : (Variabel Pencegah) • Jumlah polisi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan • Jumlah tahanan memiliki pengaruh negatif dan signifikan • Lag Crime memiliki pengaruh positif dan signifikan : (Variabel Demografi) • Usia dibawah 25 tahun memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan - Regresi II : (variabel demografi) • Usia dibawah 25 tahun memiliki pengaruh positif dan signifikan : (Variabel Pencegah) • Jumlah polisi memiliki pengaruh negatif dan
--	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>signifikan : (Variabel Ekonomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan
3	<p>Stepen Machin dan Costas Maghir (2004)</p> <p><i>Crime and Economic Incentives</i></p>	<p>Var. Dependen: Tingkat Kejahatan Properti</p> <p>Var. Independen : Tingkat upah riil; penduduk usia 15-24 tahun; panjang rata – rata hukuman; tingkat penghukuman</p>	Menggunakan metode OLS	<p>- OLS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat upah riil memiliki pengaruh negatif dan signifikan • Penduduk usia 15-24 tahun memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan • Tingkat hukuman memiliki pengaruh negatif dan signifikan • Pajang rata – rata penghukuman memiliki pengaruh negatif dan signifikan
4	<p>Lance Lochner (2007)</p> <p><i>Education and Crime</i></p>	<p>Var. Dependen : Tingkat Kejahatan</p> <p>Var. Independen : Pendidikan</p>	Metode OLS	Secara Empiris, meningkatnya tingkat pendidikan dapat menurunkan tindak kekerasan dan kejahatan properti secara signifikan
5	<p>Ihdal Husnayain (2007)</p> <p>Analisis Ekonomi Kejahatan</p>	<p>Var. Dependen : Kejahatan Properti</p> <p>Var. Independen : Pendapatan; pengangguran; proporsi usia 15-29 tahun; tingkat penyelesaian kasus oleh polisi (PAP): koefisien</p>	Metode Ordered Logit	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan - Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan - Variabel proporsi usia 15-29 tahun memiliki pengaruh positif dan signifikan - Variabel tingkat penyelesaian kasus memiliki

	Properti di Indonesia Tanun 2005	gini; kekuatan kepolisian		pengaruh positif dan signifikan - Variabel kekuatan kepolisian tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan - Variabel koefisien gini tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan
--	-------------------------------------	---------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Kerangka Pemikiran

Kemampuan seseorang untuk masuk ke aktivitas illegal atau tindak kriminal sebagian besar di sebabkan karena ketersediaan waktu yang berlebih dan ketidakmampuannya untuk masuk ke pasar kerja sehingga membuatnya menganggur dan berusaha mendapatkan kepuasan dengan cara illegal. Hal itu dikarenakan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan sangatlah kurang. Tingginya biaya pendidikan yang tidak seimbang dengan rendahnya pendapatan mereka menjadi kendala untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih dibutuhkan di pasar tenaga kerja legal.

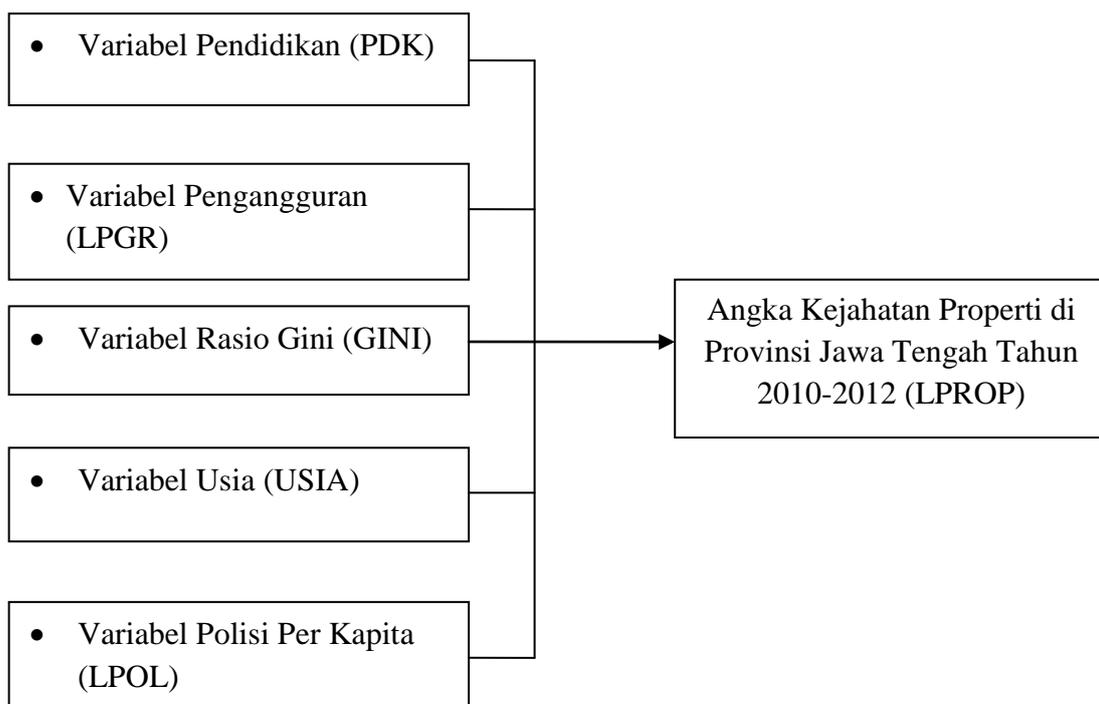
Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada pendidikan saja. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menyebabkan mereka untuk terus berusaha memenuhi kebutuhannya. Mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi tentu akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan si miskin akan terus menunggu bantuan atau melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan inilah yang akan memicu si miskin untuk melihat aktivitas illegal yang mempunyai ekspektasi nilai kepuasan lebih tinggi dibandingkan aktivitas yang legal.

Tingginya pertumbuhan penduduk terutama penduduk pada usia produktif dengan yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan juga semakin menambah tingginya tingkat kriminalitas. Hal itu dapat terjadi karena semakin tingginya angka pengangguran tentu akan menambah beban suatu negara atau daerah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa para penganggur tersebut sebenarnya termasuk dalam penduduk yang berusia produktif yang seharusnya

bisa diandalkan untuk perekonomian kita. Akan tetapi, ketersediaan waktu yang berlebih membuat mereka bingung untuk memilih bekerja di sektor legal dengan upah yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bekerja di sektor ilegal dengan ekspektasi upah yang lebih tinggi daripada upah di sektor legal.

Semakin meningkatnya tindak kriminalitas maka pemerintah didorong untuk semakin memperbanyak anggarannya guna penyediaan jasa keamanan. Dengan penambahan jumlah personil polisi atau tenaga keamanan lainnya tentu akan menurunkan jumlah kejahatan yang ada karena para pelaku kejahatan harus berpikir dua kali untuk kembali melakukan kejahatan dengan peluang tertangkap yang semakin tinggi.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Sumber :) Oliver (2002)*

2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Martono, 2011). Hipotesis pada dasarnya berfungsi untuk mengungkapkan masalah. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan pada indikator dari variabel pendidikan (PDK) diduga berpengaruh negatif terhadap perubahan angka kejahatan Properti (LPROP) di Provinsi Jawa Tengah.
2. Perubahan pada indikator dari variabel Tingkat Pengangguran (LPGR) diduga berpengaruh positif terhadap perubahan angka kejahatan Properti (LPROP) di Provinsi Jawa Tengah.
3. Perubahan pada indikator dari variabel tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (GINI) diduga berpengaruh positif pada perubahan angka kejahatan Properti (LPROP) di Provinsi Jawa Tengah.
4. Perubahan pada indikator dari variabel proporsi penduduk pria pada kelompok usia 25 - 34 tahun (USIA) diduga berpengaruh positif terhadap perubahan angka kejahatan Properti (LPROP) di Provinsi Jawa Tengah.
5. Perubahan pada indikator dari variabel polisi perkapita (LPOL) diduga berpengaruh negatif terhadap perubahan angka kejahatan Properti (LPROP) di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif variabel merupakan pusat perhatian. Variabel sendiri dapat diartikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai (Martono, 2011). Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.1.2. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut :

a) Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Martono, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah angka kejahatan hak milik/*property crime* (LPROP), yaitu jumlah tindak pidana pada kasus kejahatan properti yang dilaporkan dengan satuan jumlah kasus. Kejahatan properti merupakan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil barang atau hak milik orang lain (korban). Dalam kepolisian, kejahatan properti mencakup antara lain: pencurian dengan pemberatan, perampokan, penjambretan, pembobolan

rumah, dan pencurian kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini variabel angka kejahatan properti di log kan sehingga satuan dari variabel ini adalah persen.

b) Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang bersifat mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu (Martono, 2011). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan ada 6 variabel yaitu :

- Variabel Pendidikan (PDK)

Variabel pendidikan yang digunakan diperoleh dari persentase penduduk yang mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA dan sederajat pada 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah dalam satuan persen.

- Variabel Pengangguran (LPGR)

Variabel pengangguran yang digunakan diperoleh dari jumlah Penduduk Jawa Tengah berumur 15 tahun keatas yang termasuk pengangguran terbuka di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam satuan jumlah/jiwa. Variabel ini telah di log kan sehingga satuannya menjadi persen.

- Variabel Rasio Gini (GINI)

Variabel rasio gini yang digunakan adalah tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam satuan persen.

- Variabel Usia (USIA)

Variabel usia didefinisikan sebagai proporsi penduduk pria pada usia 25-34 terhadap jumlah penduduk pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam satuan persen.

- Variabel Polisi Perkapita (LPOL)

Variabel polisi perkapita didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah polisi per 100.000 penduduk di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam satuan jumlah/jiwa. Variabel ini kemudian di log kan sehingga satuannya menjadi persen.

- Variabel Dummy Wilayah (Dummy)

Dalam analisis regresi, variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independennya saja (dalam hal ini pendidikan, pengangguran, rasio gini, usia, dan polisi perkapita), tetapi juga oleh variabel tambahan yang tidak berubah seiring waktu atau variabel yang menunjukkan keunikan atau heterogenitas setiap daerah. Variabel ini disebut *dummy*. Tujuan dari pemberian heterogenitas atau variabel *dummy* dalam penelitian ini, untuk menandakan seberapa besar

perbedaan antara satu daerah dengan *benchmark* yang dipilih. Variabel *dummy* ditunjukkan dengan angka 0 dan 1. Dimana $D1 = 1$ untuk daerah tersebut (contoh: Semarang), dan untuk angka 0 bukan daerah tersebut (contoh: bukan Semarang) (Gujarati, 2012).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kali ini jenis data yang dibutuhkan yakni data sekunder, berupa *time series data* dan *cross-section data* (data panel). Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno & Arsyad, 1993). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain persentase siswa yang mampu menamatkan pendidikan sekolah menengah, jumlah pengangguran, rasio gini, jumlah penduduk usia 25 - 34 tahun, dan jumlah tindak kejahatan properti dari tahun 2010 hingga 2012 pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kali ini adalah mengumpulkan studi pustaka serta data yang diperlukan dari berbagai literatur, baik dari BPS maupun instansi lain yang terkait. Sehingga dalam melakukan penelitian ini tidak diperlukan teknik sampling.

3.4. Metode Analisis

3.4.1. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu observasi dengan

menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil observasi.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai alokasi anggaran pemerintah pusat untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sektor ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, dan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.4.2. Analisis Kuantitatif

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Analisis data panel adalah suatu metode yang menjelaskan mengenai gabungan dari data antar waktu (*time-series*) dengan data antar individu (*cross-section*). Keuntungan dalam menggunakan data panel menurut Baltagi (dalam Gujarati, 2012) antara lain:

1. Teknik estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.
2. Dengan data panel, data “lebih banyak memberi informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien”.
3. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross-section*.

4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *cross-section* murni atau *time-series* murni.
5. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang bisa terjadi jika kita mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan besar ke dalam agregasi besar.

Analisis data panel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *fixed effect* yang menggunakan pendekatan dengan memasukkan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Analisis regresi dalam penelitian ini diolah dengan program *Eviews*

6.0. Dengan bentuk persamaan seperti di bawah ini:

$$Y_i = \beta_1 i_t + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(3.1)$$

$$i = 1, 2, \dots N, t = 1, 2, \dots T$$

Dimana:

Y= dependen variabel

β = koefisien regresi

i = *cross-section*

t = waktu / *time series*

i t = Data Panel

μ_{it} = nilai residual (faktor pengganggu) yang berada diluar model

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *fixed effect method* (*FEM*) dengan asumsi koefisien *slope* konstan tetapi intersep bervariasi antar wilayah, karena diasumsikan masing-masing wilayah memiliki karakteristik khusus yang jelas berbeda. Model persamaan dalam pendekatan *FEM* adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Pada penelitian ini, variabel *dummy* digunakan untuk melihat intersep antar wilayah (*dummy* wilayah).

Penggunaan *dummy* wilayah (35 Kabupaten/Kota) dan Kota Magelang sebagai *benchmark*, maka terdapat 34 *intercept* yang berbeda-beda antar wilayah yang menunjukkan karakteristik tiap wilayah. Kota Magelang dipilih menjadi *benchmark* karena daerah ini memiliki rata-rata angka kejahatan property yang rendah diantara Kota maupun Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu jumlah polisi perkapita kabupaten tersebut juga relative kecil.

Model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian oleh Alison Oliver (2002). Pemilihan model ini didasarkan pada kelengkapan model dalam memilih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas.

Pada penelitian kali ini, penulis memodifikasi model berdasarkan ketersediaan data di Provinsi Jawa Tengah dan metode analisis yang digunakan. Sehingga persamaan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
LPROP_{it} = & \beta_1 + \beta_2 PDK_{it} + \beta_3 LPGR_{it} + \beta_4 GINI_{it} + \beta_5 USIA_{it} + \beta_6 LPOL_{it} \\
& + \alpha_1 D_{1i} + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_{6i} + \alpha_8 D_{8i} + \alpha_9 \\
& D_{9i} + \alpha_{10} D_{10i} + \alpha_{11} D_{11i} + \alpha_{12} D_{12i} + \alpha_{13} D_{13i} + \alpha_{14} D_{14i} + \alpha_{16} D_{16i} + \\
& \alpha_{17} D_{17i} + \alpha_{18} D_{18i} + \alpha_{19} D_{19i} + \alpha_{20} D_{20i} + \alpha_{21} D_{21i} + \alpha_{22} D_{22i} + \alpha_{23} D_{23i} + \\
& \alpha_{24} D_{24i} + \alpha_{25} D_{25i} + \alpha_{26} D_{26i} + \alpha_{27} D_{27i} + \alpha_{28} D_{28i} + \alpha_{29} D_{29i} + \alpha_{30} D_{30i} + \\
& \alpha_{31} D_{31i} + \alpha_{32} D_{32i} + \alpha_{33} D_{33i} + \alpha_{34} D_{34i} + \alpha_{35} D_{35i} + \epsilon_{it}
\end{aligned}$$

Dimana:

LPROP : Log jumlah tindak kejahatan properti di Provinsi Jawa Tengah (2010-2012)

PDK : Persentase siswa yang mampu menyelesaikan sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah (2010 – 2012)

LPGR : Log jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah (2010 – 2012)

GINI :Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah (2010-2012)

USIA : Proporsi penduduk pria berusia 25-34 tahun di Provinsi Jawa Tengah (2010 – 2012)

LPOL : Log Jumlah polisi per 100.000 penduduk

D1 : dummy Kabupaten Cilacap

D2 : dummy Kabupaten Banyumas

D3 : dummy Kabupaten Purbalingga

D4 : dummy Kabupaten Banjarnegara

D5 : dummy Kabupaten Kebumen

- D6 : dummy Kabupaten purworejo
- D7 : dummy Kabupaten Wonosobo
- D8 : dummy Kabupaten Magelang
- D9 : dummy Kabupaten Boyolali
- D10 : dummy Kabupaten Klaten
- D11 : dummy Kabupaten Sukoharjo
- D12 : dummy Kabupaten Wonogiri
- D13 : dummy Kabupaten Karanganyar
- D14 : dummy Kabupaten Sragen
- D15 : dummy Kabupaten Grobogan
- D16 : dummy Kabupaten Blora
- D17 : dummy Kabupaten Rembang
- D18 : dummy Kabupaten Pati
- D19 : dummy Kabupaten Kudus
- D20 : dummy Kabupaten Jepara
- D21 : dummy Kabupaten Demak
- D22 : dummy Kabupaten Semarang
- D23 : dummy Kabupaten Temanggung
- D24 : dummy Kabupaten Kendal
- D25 : dummy Kabupaten Batang
- D26 : dummy Kabupaten Pekalongan
- D27 : dummy Kabupaten Pemasang
- D28 : dummy kabupaten Tegal

D29	: dummy Kabupaten Brebes
D31	: dummy Kota Surakarta
D32	: dummy Kota Salatiga
D33	: dummy Kota Semarang
D34	: dummy Kota Pekalongan
D35	: dummy Kota Tegal
i	: <i>cross-section</i>
t	: <i>time-series</i>
b_1	: <i>intercept benchmark</i>
$b_2 - b_{35}$: <i>koefisien regresi</i>
$\alpha_1 \dots \alpha_{35}$: <i>intercept dummy</i>
ε	: <i>error</i>

3.5. Pendeteksian Asumsi Klasik

3.5.1. Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent variable). Deteksi multikolinearitas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi diantara variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut. Masalah multikolinearitas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas menurut Gujarati (2012), dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut:

1. Bila nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Melakukan regresi parsial dengan cara:
 - I. Melakukan estimasi model awal dalam persamaan sehingga didapat nilai R^2 .
 - II. Melakukan auxiliary regression pada masing-masing variabel penjelas.
 - III. Bandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model persamaan regresi parsial, jika nilai regresi parsial lebih tinggi maka didalamnya terdapat multikolinearitas.
3. Melakukan korelasi antar variabel-variabel independen. Bila nilai korelasi independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas

3.5.2. Deteksi Autokorelasi

Pelanggaran asumsi klasik selanjutnya adalah autokorelasi. Penyakit ini terjadi jika variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Untuk mendeteksi penyakit autokorelasi dapat digunakan nilai statistik *Durbin-Watson*

(DW) yang diambil dari hasil regresi. Dengan uji DW ini maka kita hanya mampu mendeteksi autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model.

Menurut Gujarati (2012), mekanisme pengujian *Durbin-Watson* (DW) adalah sebagai berikut :

1. Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual-residual
2. Hitung nilai d (sebagian besar paket software komputer kini melakukannya secara rutin) dengan formula sebagai berikut :

$$d = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \dots \dots \dots (3.3)$$

3. Untuk ukuran sampel dan jumlah variabel penjelas tertentu, tentukan nilai kriteria d_L dan d_U
4. Kini, ikuti aturan pengambilan keputusan yang diberikan pada Tabel 3.1 dibawah.

Tabel 3.1
Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negative	Terima	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber: Gujarati, 2012

Dengan bantuan dari program e-views, autokorelasi dapat dihilangkan dengan memilih *Newey-West HAC Standard Errors & Covariance* pada pilihan *Heteroscedasticity Consistent Coefficient Covariance*. Cara lainnya adalah dengan

meregresikan variabel bebas dengan autoregresif ordo 1 sampai p, sehingga tidak ditemukan lagi gejala autokorelasi

3.5.3. Deteksi Heterokedastisitas

Masalah varians residual yang bervariasi (*heterokedastisitas*) sering juga ditemukan dalam analisis regresi berganda. Sedangkan model regresi dapat dikatakan baik apabila varians dari residual satu ke pengamatan lain adalah tetap (*homoskedastisitas*). Konsekuensi yang harus kita terima jika kita tetap berpegang pada model regresi yang sama dengan heteroskedastisitas didalamnya, maka penghitungan *standard error* tidak lagi bisa dipercaya. Begitu juga dengan uji hipotesisnya, baik uji t dan uji F yang tidak bisa dipercaya kebenarannya untuk evaluasi hasil regresi.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity* yang tersedia dalam program Eviews. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan *Obs*Rsquared*, secara khusus adalah nilai *probability* dari *Obs*Rsquared*. Dengan uji *White*, dibandingkan *Obs*Rsquared* dengan χ^2 (*chi-squared*) Tabel. Jika nilai *Obs*Rsquared* lebih kecil dari pada χ^2 Tabel maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada model. Perbaikan (*treatment*) pada masalah ini adalah dengan menggunakan metode *white heteroskedasticity-consistent coefficient covariance*.

3.5.4. Deteksi Normalitas

Pendeteksian ini diperlukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Selain itu, kita juga dapat mengetahui apakah didalam model regresi terdapat residual yang terdistribusi normal atau tidak. Pendeteksian asumsi kenormalan ini dapat dilakukan dengan melihat *Normal Probability Plot* (*NPP*), jika variabel berasal dari populasi normal maka *NPP* akan mendekati sebuah garis lurus (Gujarati, 2011).

Selain itu kita juga dapat mendeteksi asumsi kenormalan ini dengan Uji *Jarque-Bera* (J-B). Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila data bersifat normal. JB dirumuskan dengan :

$$Jarque - Bera = \frac{N - k}{6} \left(S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right) \dots \dots \dots (3.7)$$

Apabila nilai J-B hitung > nilai χ^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ berdistribusi normal dapat ditolak. Namun, jika nilai J-B hitung < nilai χ^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

3.6. Pengujian Hipotesis

3.6.1. Uji Goodnes Of Fit (Koefisien Determinasi/ R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya (Gujarati, 2011). R^2 dirumuskan dengan :

$$R^2 = \frac{\sum(\bar{Y}_1 - \bar{Y})^2}{\sum(Y_1 - \bar{Y})^2} \dots \dots \dots (3.8)$$

Menurut Gujarati (2011) terdapat dua sifat R^2 , yaitu :

1. Besarannya tidak pernah negatif
2. Batasannya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 bernilai 1, artinya kesesuaian garisnya tepat. Akan tetapi, jika R^2 bernilai nol maka tidak ada hubungan antara regresi dengan regresor.

3.6.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t perlu dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Langkah-langkah dalam pengujian signifikansi parameter individual (Uji t) adalah (Gujarati, 2011) :

1. Tentukan hipotesisnya terlebih dahulu
 - a. Uji t untuk variabel pendidikan (PDK)

$H_0 : \beta_2 \geq 0$, diduga tidak ada pengaruh negatif antara variabel pendidikan (PDK) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

$H_1 : \beta_2 < 0$, diduga terdapat pengaruh negatif antara variabel pendidikan (PDK) terhadap variabel angka kejahatan properti (LPROP)
 - b. Uji t untuk variabel tingkat pengangguran (LPGR)

$H_0 : \beta_3 \geq 0$, diduga tidak ada pengaruh positif antara variabel pengangguran (LPGR) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

$H_1 : \beta_3 < 0$, diduga terdapat pengaruh positif antara variabel pengangguran (LPGR) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

c. Uji t untuk variabel rasio gini (GINI)

$H_0 : \beta_3 \geq 0$, diduga tidak ada pengaruh positif antara variabel (GINI) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

$H_1 : \beta_3 < 0$, diduga terdapat pengaruh positif antara variabel (GINI) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

d. Uji t untuk variabel usia (USIA)

$H_0 : \beta_4 \leq 0$, diduga tidak ada pengaruh positif antara variabel (USIA) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

$H_1 : \beta_4 > 0$, diduga terdapat pengaruh positif antara variabel (USIA) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

e. Uji t untuk variabel jumlah polisi perkapita (LPOL)

$H_0 : \beta_4 \leq 0$, diduga tidak ada pengaruh negatif antara variabel (LPOL) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

$H_1 : \beta_4 > 0$, diduga terdapat pengaruh negatif antara variabel (LPOL) terhadap variabel dependen angka kejahatan properti (LPROP)

Hitunglah nilai t hitung untuk setiap koefisien regresi dan carilah nilai t tabel. Rumus untuk menghitung nilai t hitung :

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)} \dots \dots \dots (3.9)$$

dimana :

β_i = koefisien regresi

Se (β_i) = *standard error* koefisien regresi

2. Bandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel untuk mengambil keputusan akan menolak atau menerima H_0 , dengan :
 - a. Jika $|t_{obs}| > t_{\alpha/2; (n-k)}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel bebas ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
 - b. Jika $|t_{obs}| < t_{\alpha/2; (n-k)}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Tahapan dalam melakukan pengujian ini hampir sama dengan pengujian dalam Uji t, yaitu sebagai berikut (Gujarati, 2011):

1. Tentukan hipotesisnya terlebih dahulu

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, diduga tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, diduga ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Hitunglah nilai F hitung dan carilah nilai F tabel. Rumus untuk menghitung nilai F hitung :

$$F = \frac{R^2 (k - 2)}{(1 - R^2)(n - k + 1)} \dots \dots \dots (3.10)$$

dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel

3. Bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel untuk mengambil keputusan akan menolak atau menerima H_0 (Gujarati, 2011), dengan :

- a. Jika $F_{obs} > F_{tabel (a;k-1,n-k)}$ atau signifikansi F kurang dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu angka kejahatan properti.
- b. Jika $F_{obs} < F_{tabel (a;k-1,n-k)}$ atau signifikansi F lebih dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu angka kejahatan properti.